

EFEKTIVITAS PENATAAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA KEDIRI

Selly Novicadisa, Soesilo Zauhar, Heru Ribawanto

Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: sellynovicadisa@gmail.com

Abstract: *Effectiveness The City Rebuilding Of City Urban Kediri.* This study has been background by a lot of criticism addressed to the Local apparatus Government in providing licensing services on developing buildings by the people. Kediri Local Government try to policing on developing new building in Kediri by the local regulation of Retribution and Building Permission, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010. Obligating building permit (Izin Mendirikan Bangunan) are one of those. This study used a descriptive study with a qualitative approach. In the final analysis, this study find out that the personnel less understand about the issues about the building that doesn't have a building permit and pay less attention to conditions on the ground whether the local regulation issue have managed effectively or not. Hence, the conclusion emphasizes that many of its problem are caused by less notice for the public was made and The Kediri Local Government should provide more public education about the permit applicant in the form of minimum standard requirements and procedures set out in the service of the IMB.

Keyword: *lisence of build the building (IMB), efectiveness and structuring city building*

Abstrak: **Efektivitas Penataan Bangunan Perkotaan di Kota Kediri.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik yang ditujukan kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan pendirian bangunan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Kediri menghendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan setiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pihak aparaturnya kurang mengetahui masalah bangunan yang tidak memiliki IMB serta kurang memperhatikan kondisi di lapangan apakah Peraturan Daerah yang dikeluarkan sudah berhasil efektif atau masih mengambang. Sebaiknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemohon IMB mengenai standar minimal dalam bentuk syarat dan prosedur yang ditetapkan pada proses pelayanan IMB.

Kata kunci: *izin mendirikan bangunan, efektivitas dan penataan bangunan perkotaan*

Pendahuluan

Di Kota Kediri melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Kediri menghendaki tercipta ketertiban dalam kegiatan pembangunan yang pada saat ini sedang gencar dilaksanakan. Pemberian izin yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan.

Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan

baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan.

Namun data di lapangan menunjukkan bahwa di Kota Kediri masih banyak bangunan yang belum mempunyai IMB mungkin saja kesadaran masyarakat kota Kediri masih kurang. Di Kota Kediri juga ada bangunan yang sudah punya IMB namun dibongkar oleh petugas, karena pengajuan izin bangunan ternyata tidak sesuai dengan bangunan yang dibangun, di IMB berbunyi bangunan rumah namun kenyataannya malah dibangun ruko, ini merupakan pelanggaran.

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 setiap penerbitan IMB, pemohon dikenakan pungutan berupa retribusi untuk biaya sempadan, biaya pengawasan, biaya konstruksi bangunan, dan biaya pendaftaran yang harus dibayar

atau dilunasi oleh pemohon sebelum yang bersangkutan menerima surat IMB. Retribusi disetorkan ke Kas Daerah sebagai salah satu pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, dalam penerbitan IMB terkandung dua hal yang erat kaitannya dengan fungsi pemerintah, yaitu fungsi pengendalian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketertiban dalam kegiatan pembangunan diwujudkan antara lain dengan mematuhi Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan sebelum memulai proses pembangunan. Namun pada penerapannya, beberapa proses pembangunan di Kota Kediri, khususnya pada kecamatan kota yang menjadi sentral pembangunan masih ada beberapa gedung yang belum mendapat izin mendirikan bangunan namun sudah digunakan. Pengurusan IMB yang belum berjalan efektif dan efisien, serta ada yang belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Penyebab pokok dari masalah yang diungkap di atas, antara lain adalah kurangnya peran serta aktif dari masyarakat luas dalam proses pembangunan kota. Efektivitas sebuah perda perlu diuji antara bagusnya konsep peraturan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Peraturan dikatakan efektif apabila dalam masyarakat tercipta suatu kehidupan yang lebih baik.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) sebenarnya sudah menjadi realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Pengertian dasar kebijakan publik adalah sebagai perwujudan keinginan dari para sarjana sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial di lapangan (*close the gap between knowledge and policy*) (Parsons, 1997, h.21). Oleh karenanya kebijakan publik dipandang sebagai pedoman atau penuntun yang dipilih oleh pengambil keputusan untuk mengendalikan aspek tertentu dari masalah sosial.

Dalam setiap proses kebijakan, Nakamura dan Smallwood dalam Sulaeman (2002, h.31) juga menjelaskan “Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dan para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi; dan lingkungan evaluasi”.

Sebuah kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. Dalam membuat kebijakan publik, pemerintah harus tetap memperhatikan proses pembuatan kebijaksanaan tersebut, yang mana proses pembuatan kebijakan publik umumnya dipahami terdiri atas serangkaian tahap atau fase.

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi (1998, h.147) mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987, h.55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (1987, h.55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur

keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya.

Metode Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini data yang dihasilkan adalah data berupa ucapan atau penulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (obyek) itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri yaitu seluruh wilayah administrasi Kota Kediri, penelitian ini melibatkan dinas-dinas dan kantor yang ada di kota Kediri antara lain:

1. Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Kota Telp. 682345
2. Bidang Tata Ruang Dinas PU Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brigjen Imam Bachri 100A Kecamatan Pesantren Telp. 686949

Sumber data dalam penelitian ini di dapat dari data primer dan data skunder. Data primer antara lain:

1. Kepala dan Staff Bidang Tata Ruang Dinas PU
2. Kepala dan Staff Kantor Pelayanan Perizinan (KPP)

Sedangkan data sekunder antara lain:

1. Penjabaran umum mengenai profil kantor Pelayanan Perizinan (KPP)
2. Peta letak Tata Ruang Kota Kediri
3. Bidang Tata Ruang Dinas PU Kota sebagai lembaga yang mengurus tentang keselarasan pembangunan sarana, prasarana, permukiman di Kota Kediri.

Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan langkah-langkah membaca data, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan *reduksi data* yang dilanjutkan dengan jalan membuat abstraksi (rangkuman sementara). Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun-nya dalam satuan-satuan, kemudian di kategori-sasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengadakan pemeriksaan data. (Moleong, h.191). Setelah selesai tahap ini,

mulailah kini tahap penafsiran data. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna (*meaning*). Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, serta penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tata Cara Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010

Dengan adanya IMB dapat menjamin kenyamanan bangunan tersebut karena disertai dengan syarat-syarat bentuk bangunan, fungsi bangunan, aspek kenyamanan dan lingkungan. Seperti yang tercantum pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kediri pada umumnya membutuhkan aparatur yang memadai dan berkualitas, karena kegiatan suatu unit kerja yang tidak didukung dengan sumber daya aparatur yang baik sulit untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pemberian IMB diperuntukkan kepada para masyarakat yang ingin mendirikan atau memperluas bangunannya. Besar kecilnya suatu bangunan yang akan dibangun atau diperluas bahkan direnovasi harus disahkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam bentuk surat IMB. Dalam hal ini IMB dijadikan suatu bentuk legalitas, yang mana legalitas ini sangat berguna sebagai keabsahan kepemilikan bangunan atau dapat diartikan sebagai kepemilikan resmi bangunan tersebut.

Proses pelayanan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu 14 hari. Empat belas hari tersebut mulai dari pendaftaran di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri sampai dengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan tersebut. Sesuai dengan prosedur, pemohon yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu melalui tahap demi tahap dalam proses pengurusan tersebut dan semuanya itu dilalui dalam kurung waktu 14 (*empat belas*) hari kerja. Namun sebelum itu, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari kelurahan dimana lokasi bangunan yang akan didirikan yang selanjutnya diketahui oleh pihak kecamatan. Secara rinci dapat dijelaskan tata cara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

- a. Mengambil formulir di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
- b. Mengisi formulir tersebut serta mengisi formulir permohonan IMB.
- c. Pemohon melakukan pendaftaran izin mendirikan bangunan (IMB) di loket Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
- d. Penilai akan membuat surat bukti setoran (slip pembayaran) pembayaran retribusi yang dikenakan untuk permohonan IMB yang diajukan.
- e. Pemohon diarahkan untuk ke Loka Pembayaran di Kantor Pelayanan Perizinan untuk melakukan pembayaran.
- f. Dengan menyerahkan Bukti pembayaran, maka berkas pemohon IMB dapat diproses sesuai fungsi bangunannya.
- g. Pemeriksaan administrasi dan teknis ini dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Perizinan..
- h. Pemohon dapat membeli atau membuat sendiri papan plat untuk dipasang ke lokasi proyek.

Prosedur atau tata cara pelayanan yang sudah ditetapkan dapat diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan permintaan masyarakat tentang pelayanan publik, khususnya tentang pelayanan pemberian IMB. Prinsip kesederhanaan pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional.

Dengan hal ini berbagai kemudahan dalam pengurusan IMB saat ini di Kota Kediri, pada akhirnya berpengaruh terhadap banyak berdirinya bangunan-bangunan baru di kawasan-kawasan yang strategis. bangunan-bangunan yang belakangan ini sangat banyak dibangun adalah bangunan-bangunan dengan skala besar yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan integrasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan IMB di Kota Kediri tergolong mudah jika segala syarat dan prosedur yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik oleh pemohon.

2. Penataan Bangunan Perkotaan dalam Perda No 7 Tahun 2010 di Kota Kediri

Perencanaan penataan bangunan perkotaan di Kota Kediri pada umumnya menjadi wewenang pemerintah Kota Kediri, yang kemudian diimplementasikan dengan keputusan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan. Secara konsep Perda Kota Kediri Nomor 7 tahun 2010 sudah sesuai dengan kondisi kota Kediri, meski masih perlu dikritisi lebih jauh lagi. Namun untuk bisa

dikatakan perda itu efektif atau tidak sebenarnya bukan hanya berdasarkan konsep saja melainkan harus ada uji materialisasi apakah perda tersebut membawa dampak positif atau tidak terhadap masyarakat kota Kediri.

Dengan banyak berdirinya bangunan belakangan ini di kota Kediri sedikit banyak menimbulkan banyak pertanyaan mengenai prosedur pengurusan IMB, bentuk bangunan dan fungsi bangunan yang ditetapkan. Apakah mungkin dengan mudah bangunan tersebut dapat berdiri tanpa ada ketetapan yang jelas? Padahal dapat diketahui bahwa luas wilayah Kota Kediri juga tidak begitu besar. Namun semua itu terjawab. Pertanyaan-pertanyaan besar semacam itu akhirnya dapat dijawab bahkan dapat dipatahkan oleh alasan yang mendasar disetujuinya pengajuan IMB oleh pemohon yang berkepentingan dalam hal ini pada dasar awalnya pendirian bangunan tersebut adalah atas dasar persetujuan pemohon IMB itu sendiri.

Karena pada dasarnya dinas-dinas inilah yang akan terjun langsung secara teknis mendatangi lokasi atau kawasan yang akan dibangun. Sesuai dengan bidang dan kewajibannya masing-masing maka para dinas-dinas terkait melakukan *survey* dan pertimbangan sesuai porsinya. Dari semua *survey* yang dilakukan bagian akhirnya akan diserahkan pada Kantor Pelayanan Perizinan sebagai dinas yang berwenang dalam mengelola data-data tersebut untuk kemudian diproses dan dikeluarkan jika memang syarat-syarat prosedur pengajuan IMB dan masyarakat yang diwakili oleh kelurahan sudah tercapai.

Dalam prosesnya tidak jarang masyarakat mengalami kendala bagi kelancaran proses IMB. Secara seksama warga sekitar tidak ingin melewatkan kesempatan atau bahkan dirugikan dengan adanya bangunan yang berada disekitar tempat tinggalnya. Dengan adanya upaya tersebut pada akhirnya mampu memperlancar proses IMB serta penerapan Izin Mendirikan Bangunan akan selalu ditingkatkan, penerapan disini yang dimaksud sejak dari awal proses hingga pelaksanaannya karena pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dalam hal perizinan adalah bersifat pasti, tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak lain tanpa adanya alasan yang melatarbelakangi dengan jelas.

3. Efektifitas Perda Tata Ruang Kota Kediri dalam Penataan bangunan Perkotaan

Secara teori efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pe-

kerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Jadi peraturan bisa dikatakan efektif apabila peraturan tersebut sesuai dengan dengan yang di-kehendaki. Artinya, pencapaian hal yang di-maksud merupakan pencapaian tujuan dilakukan-nya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Dalam penataan bangunan di kota Kediri yang sesuai dengan peraturan daerah kota Kediri maka efektif atau tidaknya peraturan tersebut bisa dianalisis sebagai berikut:

Pertama efisiensi dan pelayanan: efisiensi dan pelayanan dalam fakta di lapangan menandakan bahwa dalam menjalankan Perda Kota Kediri No 7 tahun 2010 dinas terkait dalam hal ini Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri. Sebagaimana fungsi yang diembannya untuk dapat melayani masyarakat. Sehingga cita-cita dan citra Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri terus terpelihara di mata masyarakat untuk dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan Kota Kediri. Meski kendala-kendala masih sering dihadapi dalam melayani masyarakat.

Kedua ketepatan waktu: dalam data lapangan ketepatan waktu dalam memberikan IMB sudah berjalan sesuai peraturan, namun jika pada beberapa waktu tertentu ada sebuah kendala yang menyebabkan penunggakan waktu itu dikarenakan bukan dari dalam Kantor Pelayanan Perizinan, melainkan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah rekomendasi dari dinas-dinas lain yang terkait seperti rekomendasi dari Walikota, Bappeda dan rekomendasi dari masyarakat sekitar daerah pengajuan IMB yang diwakili oleh Kelurahan dan Kecamatan, atau bahkan dari pemohon itu sendiri. Misalnya saja dengan kurangnya pemenuhan syarat atau kurang fahamnya dengan prosedur yang berlaku. Hal-hal semacam itu sedikit banyak sangat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian proses IMB.

Ketiga biaya pelayanan: Untuk biaya pelayanan disesuaikan dengan peraturan Nomor 7 Tahun 2010 masyarakat yang mengurus IMB

ternyata mendapat biaya pelayanan diatas peraturan yang berlaku bisa langsung melaporkan kepada dinas terkait.

Keempat daya tanggap petugas: dengan adanya keterbukaan publik daya tanggap petugas lebih tinggi disbanding dengan sebelum reformasi. Petugas di Kantor Pelayanan Perizinan dalam melayani IMB sangat tanggap akan prosedur yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya disiplin kerja yang tinggi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pelayanan IMB terhadap masyarakat yang berkepentingan di dalamnya sehingga tujuannya dapat tercapai khususnya untuk masyarakat pemohon IMB.

Kelima sarana prasarana: sarana prasarana idealnya harus terus diperbarui dan dilengkapi, namun karena biasanya terbentur dengan anggaran maka hal itu bisa menjadi masalah tersendiri. Dengan peralatan yang baik dan media informasi juga digunakan secara maksimal maka akan memberi hasil kerja yang baik pula apabila disertai dengan pegawai dan tenaga pengajar yang cukup serta mempunyai keahlian yang memadai. Dengan demikian, para pegawai juga akan lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Kesimpulan

Dalam penataan bangunan perkotaan di Kota Kediri sudah cukup efektif hal ini dibuktikan dari Efisiensi dalam pelayanan dapat dilihat dari segi waktu dan biaya pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya yang sudah sesuai dengan aturan dan semangat kerja petugas. Namun kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah kota Kediri terkait dengan penataan bangunan di kota Kediri yang sudah terlanjur dibangun ternyata masih menyisakan masalah tersendiri. Bangunan yang belum mempunyai IBM, bangunan yang tidak sesuai pada tempatnya, ternyata masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah meski hal tersebut sudah melanggar peraturan daerah kota Kediri tentang penataan bangunan perkotaan.

Daftar Pustaka

- Gie, The Liang. (1998) *Kode Etik Bagi Petugas Pemerintahan*. Bahan Pemikiran Untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa. Pusat Belajar Ilmu Berguna (PUBIG), Yogyakarta.
- Lubis, S.B. Hari dan Huseini, Martani. (1987) *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro)*. Jakarta: PAUIS – UI
- Moleong, Lexy, J. (2000) *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy, J. (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan. Kediri, Pemerintah Kota Kediri.

Sulaeman, Affan. (2002) *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan
Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Wahab, Solichin A. (1997) *Evaluasi Kebijakan Publik*. FIA UB dan IKIP Malang